

KONFLIK PENGELOLAAN POS KESEHATAN NAGARI (POSKESRI) DI NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ela Mayasari^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}elamayasari1705@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

02-06-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

Kata Kunci:

Konflik, Pengelolaan, Poskesri

Keywords:

Conflict, Management,

Poskesri

Corresponding Author:

elamayasari1705@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan prakonflik, konfrontasi, krisis atau puncak konflik dan pascakonflik. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data, yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data meliputi Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prakonflik, poskesri tidak lagi beroperasi seperti biasa, karena bidan desa yang biasanya bertugas di poskesri tersebut sekarang tidak lagi bertugas. 2) Konfrontasi, pada tahap ini dimana konflik mulai terbuka. Bidan desa tidak lagi bertugas di poskesri di nagari kudo-kudo Inderapura, pada dasarnya pihak nagari sudah mengajukan bidan pengganti namun belum ditanggapi. 3) Krisis atau puncak konflik, dimana masalah mulai memuncak dan jika dilakukan komunikasi maka akan cenderung menuduh satu sama lain. Pihak pemilik tanah yang sudah dihibahkan untuk pendirian poskesri tidak mengizinkan bidan lain untuk mengisi kekosongan poskesri tersebut kecuali dari sanak familinya sedangkan honor bidan desa juga tidak lagi turun dari pemerintah kabupaten. 4) Pascakonflik, tahap ini merupakan dari penyelesaian permasalahan agar menjadi lebih normal. Pihak nagari dan lembaga nagari sudah ikut andil dan memberikan solusi karena nagari ingin yang terbaik untuk masyarakatnya. Namun penyelesaiannya belum ditemukan sehingga poskesri belum beroperasi sampai saat ini.

ABSTRACT

This study aims to determine the dynamics of conflict, namely to find out how the pre-conflict, confrontation, crisis or peak of conflict and post-conflict are. Qualitative research with descriptive methods. Data sources, namely primary and secondary. Collecting data using observation, interviews and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that: 1) Pre-conflict, Poskesri is no longer operating as usual, because the village midwife who usually works at the Poskesri is no longer on duty. 2) Confrontation, at this stage where the conflict begins to open. The village midwife is no longer on duty at the Poskesri in Nagari Kudo-kudo Inderapura, basically the Nagari has proposed a replacement midwife but has not received a response. 3) Crisis or peak conflict, where problems start to peak and if communication is carried out, they will tend to accuse each other. The owner of the land that had been granted a grant for the establishment of the poskesri did not allow other midwives to fill the vacancy in the poskesri except from their relatives, while the village midwife's honorarium was also no longer coming down from the district government. 4) Post-conflict, this stage is from solving problems so that they become more normal. The nagari and nagari institutions have contributed and provided solutions because the nagari wants the best for its people. However, the solution has not been found so that Poskesri has not been operating until now.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i2.93>

PENDAHULUAN

Penamaan pemerintahan terendah di Sumatera Barat disebut dengan pemerintahan Nagari. Peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat terakhir diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan falsafah adat alam Minangkabau. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari hal ini didasarkan kepada kebijakan. Dimana pemerintah nagari dipimpin oleh wali nagari ataupun nama lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Perda No. 7 Tahun 2018 pasal 10 menjelaskan bahwa kepala nagari atau dalam Perda yang juga di sebut dengan (kapalo nagari) bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Hal ini berarti pelayanan yang terdekat ke masyarakat di Sumatera Barat dilakukan oleh pemerintah nagari. Pelayanan publik ini melingkupi berbagai bidang termasuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat nagari. Pelayanan kesehatan masyarakat nagari ini dilakukan dengan mendirikan pos kesehatan Nagari (Poskesri) di setiap Nagari. Hal ini dimaksud agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jika sekiranya pelayanan kesehatan jauh dari nagari. Pembangunan Poskesri diserahkan kepada nagari untuk membangun dan mengelolanya. Hal ini juga berlaku pada pembangunan Poskesri di Nagari Kudo-kudo Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan

sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari. Peraturan Daerah Tentang Nagari di dalam pasal 1 ada beberapa poin penting yaitu : poin 10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, poin 13. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, poin 15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari ada penjelasan tentang kewenangan Nagari dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan beberapa poin yaitu : a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar nagari; c. pengelolaan jaringan irigasi; d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat nagari; e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya, sanggar belajar serta permainan anak nagari; g. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan; h. pengelolaan embung nagari; i. pengelolaan air minum berskala nagari; dan j. pembuatan jalan nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.

Peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat terakhir diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dalam Pasal 1 Ayat(3) menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan falsafah adat alam Minangkabau. Kepemimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan nagari disebut dengan wali nagari atau kapalo nagari.

Dalam Perda No. 7 Tahun 2018 pasal 10 menjelaskan bahwa kepala nagari atau dalam

Perda yang juga di sebut dengan (kapalo nagari) bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Hal ini berarti pelayanan yang terdekat ke masyarakat di Sumatera Barat dilakukan oleh pemerintah nagari. Pelayanan publik ini melingkupi berbagai bidang termasuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat nagari. Pelayanan kesehatan masyarakat nagari ini dilakukan dengan mendirikan pos kesehatan Nagari (Poskesri) di setiap Nagari. Hal ini dimaksud agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jika sekiranya pelayanan kesehatan jauh dari nagari. Pembangunan Poskesri diserahkan kepada nagari untuk membangun dan mengelolanya. Hal ini juga berlaku pada pembangunan Poskesri di Nagari Kudo-kudo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan supaya pelayanan publik di nagari lebih dekat dirasakan oleh masyarakat yaitu salah satu pelayanannya adalah poskesri.

Di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pengurangan jumlah poskesri yang beroperasi di masing-masing kecamatan. Hal ini sebenarnya terjadi penurunan setidaknya ada delapan kecamatan yang mengalami terjadinya penurunan pengurangan poskesri di masing-masing kecamatan dari data terakhir BPS 2020. Permasalahan ini kecenderungannya terjadi karena seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pancung Soal, khususnya di Nagari Kudo-Kudo Inderapura. Persoalan ini disebabkan oleh salah satunya adalah perkara bidannya pindah dan membuat operasional poskesri tidak dapat berjalan lagi setelah bidan tersebut pindah. Hal ini seperti yang terjadi di Nagari Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal.

Pada awal tahun 2016 Nagari Kudo-Kudo mulai merencanakan mendirikan poskesri dalam musrenbang nagari dan disepakati menggunakan dana nagari. Hal ini dimaksud guna membantu masyarakat agar lebih mudah dalam penanganan kesehatan dan tidak jauh untuk pergi ke puskesmas pusat. Karena jarak yang jauh ini maka didirikan poskesri di Nagari Kudo-Kudo.

Pada bulan Maret 2016 poskesri mulai dibangun di daerah kawasan Bukit Tahil Mas di Nagari Kudo-Kudo dengan kesepakatan nagari dan masyarakat yang bersedia menghibahkan tanahnya untuk didirikan poskesri tersebut. Antusiasme pendirian poskesri di Nagari Kudo-

Kudo ini membuat pembangunan poskesri dapat selesai dengan cepat pada bulan Juli 2016 lalu Poskesri Nagari Kudo-Kudo ini pada bulan September 2016, seharusnya masyarakat banyak merasakan manfaatnya seperti pertolongan pertama pada ibu hamil yang melahirkan, orang kecelakaan, serta masyarakat yang sakit dan membutuhkan pemeriksaan serta obat-obatan. Hal ini sangat membantu masyarakat karena tidak perlu datang ke puskesmas pusat yang jaraknya cukup jauh.

Namun pada bulan Mei 2021, Poskesri Nagari Kudo-Kudo tidak lagi beraktivitas ketika bidan yang biasa bertugas pindah ke nagari lain. Hal ini berimbas pada berhentinya operasional poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura sehingga masyarakat merasakan dampak dari berhentinya operasional poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura dalam merasakan pelayanan kesehatan yang dekat pada masyarakat. Karena harus kembali ke puskesmas pusat yang berada jauh dari Nagari Kudo-Kudo Inderapura yang berjarak kurang lebih 4 km dari nagari tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Fisher. Fisher mengemukakan ada 4 tahapan dinamika konflik yaitu:

- 1) Prakonflik, Fisher mengatakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. Berdasarkan pendapat fisher diatas bahwa konflik muncul karena adanya ketegangan atau pertikaian antar dua pihak atau lebih.
- 2) Konfrontasi, Fisher mengatakan memperlihatkan suatu tahap pada saat ini konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan aksi konfrontasi lainnya. Berdasarkan pendapat fisher diatas bahwa konflik mulai diketahui, jika satu pihak yang merasa ada masalah maka para pendukung melakukan demonstrasi lain.
- 3) Krisis atau Puncak Konflik, Fisher mengatakan tahap ini dimana merupakan puncak dari konflik ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat, komunikasi yang normal di antara kedua belah pihak

kemungkinan putus pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh pihak lain. Menang atau kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Berdasarkan pendapat Fisher di atas bahwa konflik mulai terjadinya ketegangan dimana ini merupakan fase puncak dari konflik dimana muncul komunikasi yang akan cenderung menuduh satu sama lain.

- 4) Pascakonflik, Fisher mengatakan situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Jika masalah yang bertentangan tidak diatasi dengan baik situasi ini sering kembali menjadi situasi prakonflik atau masalah ini belum selesai sepenuhnya. Berdasarkan pendapat Fisher di atas bahwa konflik di fase ini mulai menyelesaikan pertentangan yang ada sehingga menjadikan konflik lebih normal dan tidak terjadinya konflik lagi, namun konflik ini tidak sepenuhnya selesai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif semu yang menggunakan metode deskriptif Lokasi penelitian di Kantor Wali Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dan teknik purposive sampling, dimana dalam pemilihan informan hanya berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang memahami dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang penulis teliti. Jenis dan sumber data di bagi menjadi 2 jenis, yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan instrument penelitian berupa observasi ke lapangan dan dilakukan wawancara dan kemudian studi dokumentasi digunakan untuk dokumen dalam penelitian. Instrument penelitian pada penelitian ini alat bantu merekam data seperti , kamera, perekam suara, panduan wawancara dan lembar observasi, dan teknik pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi (gabungan). Sedangkan teknik analisis data menggunakan 3 variabel yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Pos Kesehatan Nagari (Poskesri)

Konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber2 kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.

Dari konflik yang terjadi di poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura membuat banyak kalangan dari masyarakat menengah kebawah merasakan dampak yang begitu terasa, dimana masyarakat yang amat berharap pada beroperasinya poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura , karena dengan adanya poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura sangat membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dimana pada umumnya masyarakat Nagari Kudo-Kudo Inderapura adalah sebagiannya adalah sebagai petani.

Masyarakat Nagari Kudo-Kudo Inderapura yang keseharian sebagai petani sangat membutuhkan poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura untuk dapat memperoleh obat-obatan atau pelayanan kesehatan yang dekat, karena jika sebagai petani maka masyarakat akan sering berobat ke poskesri, karena sangat membutuhkannya, hal ini seperti masyarakat yang pulang dari bertani pasti kelelahan dan sering juga demam oleh karena itu dengan adanya poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura yang bisa pelayanan kesehatannya di jangkau

karena lokasi yang dekat dan membuat masyarakat amat sangat merasakan bahagia dengan kehadiran poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura ini.

Dengan adanya Poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura tentunya memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang kesehatan agar masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke Puskesmas pusat yang jaraknya berada cukup jauh dari Nagari Kudo-Kudo Inderapura.

Tentunya hal tersebut akan memakan waktu yang lama untuk masyarakat dari rumah ke Puskesmas pusat dikarenakan jarak yang lumayan jauh, dan juga jalan yang dari Nagari Kudo-Kudo Inderapura menuju Puskesmas cukup buruk, dimana jalan dulunya batu yang sudah dibeton namun sekarang sudah hancur karena banyaknya mobil sawit besar yang keluar masuk sehingga menyebabkan cepatnya rusak jalan beton tersebut, sekarang jalan yang berada di Nagari Kudo-Kudo Inderapura di tempat berdirinya poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura sudah berlubang-lubang bahkan hampir sepanjang jalan sudah rusak membuat warga kesulitan dalam menempuh jalan yang rusak sehingga membuat masyarakat kesusahan untuk mengaksesnya. Semenjak berdirinya poskesri di Nagari Kudo-Kudo ini masyarakat sangat terbantu akan adanya fasilitas kesehatan ini. Mulai dari jarak tempuh yang dekat, akses yang mudah untuk didatangi, serta tidak kesulitan harus pergi jauh ke Puskesmas pusat lagi.

Namun poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura ini mengalami pemberhentian beroperasi dikarenakan adanya beberapa konflik atau permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu penulis akan membahas tahapan dinamikan konflik menurut Fisher yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis atau puncak konflik dan pascakonflik sebagai berikut:

Prakonflik

Prakonflik merupakan tahap awal dari terjadinya suatu konflik yang mana bahwasanya konflik awal muncul karena adanya pertikaian atau ketegangan antar dua pihak atau lebih. Berdasarkan data yang di peroleh, prakonflik terjadi awal mulanya karena bidan desa yang bertugas di Poskesri tersebut sudah tidak lagi bertugas dan pindah ke desa lain, dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara pemilik tanah dengan pihak nagari.

Prakonflik merupakan tahap awal dari suatu permasalahan yang terjadi di poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura, dimana pada bulan Maret 2016 didirikan poskesri di nagari kudo-kudo inderapura guna dapat membantu masyarakat dalam lebih mudah untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan. Lalu pada bulan Juli 2016 poskesri ini telah selesai di bangun sesuai dengan target pemerintahan Nagari Kudo-Kudo Inderapura. Dibulan September 2016 poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura sudah mulai beroperasi dan sudah melakukan pelayan kesehatan sehingga banyak masyarakat yang merasakan dampak dari berdirinya poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura.

Pada bulan September 2016 poskesri ini sudah bisa diraskan oleh masyarakat setempat dimana masyarakat mendapatkan pertolongan pertama tidak lagi jauh ke Puskesmas pusat. Hal ini sangat membantu masyarakat yang mana jarak dari nagari dan Puskesmas yang jauh sehingga membuat masyarakat kesusahan untuk pergi ke puskesmas, dengan adanya poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura ini masyarakat sangat terbantu yang mana jarak tempuh untuk pergi mendapatkan pelayanan kesehatan sekarang sudah dekat dan tidak susah payah lagi untuk pergi ke Puskesmas.

Masyarakat sangat senang akan keberlangsungan poskesri ini dimana disini dilakukan banyak kegiatan kesehatan dan juga di poskesri ini dilakukan kegiatan posyandu dalam sekali sebulan. Namun tidak selang waktu beberapa tahun, poskesri ini berhenti berproses, dimana bidan desa yang biasanya menempati poskesri ini tidak lagi bertugas di poskesri tersebut. Sehingga membuat poskesri ini sekarang kosong dan tidak ada lagi bidan desanya. ini membuat masyarakat merasakan kehilangan akan akses pelayanan kesehatan terdekat.

Semenjak poskesri di nagari kudo-kudo inderapura tidak lagi berproses, masyarakat yang biasanya mendapatkan pelayanan kesehatan lebih dekat sekarang harus pergi cukup jauh ke puskesmas pusat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Ini semua membuat masyarakat mengeluh ke pihak pemerintah setempat yaitu ke pihak nagari kudo-kudo inderapura. Semenjak Mei tahun 2021 poskesri ini sudah tidak lagi berproses seperti biasanya dimana masyarakat yang amat banyak merasakan dampak dari berhenti berprosesnya poskesri ini dimana masyarakat yang biasanya

dekat untuk pergi berobat sekarang sudah jauh ke puskesmas pusat.

Konfrontasi

Pada tahap konfrontasi ini permasalahan mulai terbuka, dimana bidan desa yang bertugas di poskesri ini tidak lagi bertugas, sehingga menyebabkan poskesri ini kosong dan tidak ada lagi bidan desanya. Pada dasarnya pihak nagari telah melakukan pengajuan bidan desa yang baru untuk menempati poskesri yang kosong tersebut namun belum ditanggapi oleh puskesmas pusat.

Dimana dalam hal ini pihak keluarga pemilik tanah yang sudah dihibahkan untuk didirikan poskesri ini mengklaim bahwasanya poskesri ini didirikan di tanah kelurganya, dan merek mengingunkan bidan desa yang akan bertugas untuk poskesri nantinya adalah dari sanak family mereka, jika tidak mereka tidak mengixinkan karena mereka masih mengklaim bahwasanya pendirian poskesri di wilayah tanah keluarganya.

Namun hal ini juga membuat konflik antara pemilik tanah dan nagari, karena tanah tempat didirikan poskesri tersebut sudah dihibahkan oleh orangtua mereka ke pihak nagari untuk didirikan poskesri tersebut. Hal ini membuat janggal dalam permasalahan ini sehingga dari konflik ini banyak yang akan menanggung dampak dari semuanya. Masyarakat yang sangat berharap akan poskesri ini yang menjadi sasaran dari permasalahan ini, karena msyarakat akan menajdi susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terdekat lagi.

Krisis atau Puncak Konflik

Pada tahap krisis atau puncak konflik ini disinilah semua permasalahan muncul dan memuncak. Dimana jika dilakukan komunikasi akan lebih cendrung menuduh satu sama lainnya, hal ini juga membuat pihak dari manapun menjadi serba susah dalam menanganinya.

Dimana pihak dari pemilik tanah tidak mengizinkan bidan lain yang akan mengisi poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura tersebut selain dari sanak familinya, namun dari sanak family mereka tidak ada yang mengusulkan yang akan menjadi bidan desa, hal ini membuat nagari kebingungan. Semenjak poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura berhenti beroperasi dan semenjak tidak ada lagi bidan desa yang menjali aktifitas di poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura, honor bidan

desa tidak lagi diturunkan oleh pemerintah kabupaten, sehingga pihak nagaripun sekarang menjadi kebingungan dalam masalah ini.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya dari pihak nagari dan lembaga nagari sudah berusaha untuk mencari bidan pengganti, namun terdapat kendala dalam solusi ini yakni bidan desa yang di usulkan belum diberi tanggapan oleh pihak puskesmas. Dalam hal ini ditambah lagi sekarang honor bidan desa untuk poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura tidak lagi dikeluarkan oleh pihak pemerintah kabupaten, yang mana biasanya honor bidan desa poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura ditanggung pemerintah. Semenjak poskesri ini kosong sudah beberapa tahun ini maka honor bidan desa untuk poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura tidak lagi dikeluarkan.

Menyebabkan poskesri ini tetap kosong sampai saat ini, maka dari pihak nagari hanya bisa menunggu bagaimana proses yang akan terjadi untuk selanjutnya untuk poskesri dapat beroperasi kembali agar masyarakat Nagari Kudo-Kudo Inderapura bisa merasakan pelayanan kesehatan dari poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapurakembali seperti biasanya.

Pascakonflik

Pascakonflik yaitu dimana pada tahap ini dilakukan penyelesaian dari permasalahan yang ada agar menjadi lebih normal, namun dari tahap penyelesaian konflik ini tidak sepenuhnya dapat diselesaikan.

Dari pihak nagari maupun lembaga nagari yang ikut andil dalam masalah ini juga sudah mencari solusi terbaik untuk permasalahan terhadap poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura. Bahkan pihak nagari dan lembaga nagari ingin yang terbaik untuk magari dan masyarakatnya. Namun tidak dipungkiri masalah ini belum ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan dari konflik yang terjadi.

Dalam permasalahan ini pihak ibu pkk sudah mencoba untuk mengusulkan bidan desa pengganti untuk menempati poskesri yang kosong, begitu juga pihak nagari juga sudah mengajukan bidan desa pengganti untuk poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura namun belum ditanggapi. Ditambah lagi dengan honor bidan desa untuk poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura tidak turun lagi dari kabupaten sehingga membuat nagari tidak juga menemukan solusi lagi dan hanya bisa

membiarkan poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura kosong sampai sekarang ini.

Begitu pula dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pancung Soal juga sudah memberikan saran terhadap permasalahan Poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura untuk dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya, berharap poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura dapat beroperasi lagi seperti biasanya, agar dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan terdekat. Jika poskesri Nagari Kudo-Kudo Inderapura terus-terusan tutup dan tidak berfungsi maka akan banyak masyarakat yang merasakan rugi dalam hal ini, tidak hanya masyarakat namun pihak pemerintahan Nagari Kudo-Kudo Inderapura juga akan merasa rugi dimana tempat yang sudah didirikan dan fasilitas yang ada namun tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

PENUTUP

Konflik dalam pengelolaan pos kesehatan nagari (poskesri) di Nagari Kudo-Kudo Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat melalui 4 dinamika konflik yang pertama prakonflik dimana awal mula terjadinya masalah poskesri, dimana poskesri yang biasanya berproses dalam pelayanan kesehatan sekarang tidak lagi berproses seperti biasanya, karena bidan desa yang biasanya bertugas di poskesri tersebut sekarang tidak lagi bertugas di poskesri tersebut. Hal ini membuat masyarakat banyak kehilangan akses pelayanan kesehatan terdekat, semenjak poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura tidak lagi berproses masyarakat yang biasanya mendapatkan pelayanan kesehatan terdekat sekarang harus pergi cukup jauh ke puskesmas pusat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Konflik yang kedua yaitu konfrontasi yaitu pada tahap ini dimana konflik mulai terbuka, yaitu dimana bidan desa yang biasanya bertugas sekarang tidak lagi bertugas di poskesri di Nagari Kudo-Kudo Inderapura, pada dasarnya pihak nagari sudah mengajukan bidan pengganti yang akan berproses di poskesri tersebut, namun belum ditanggapi. Hal ini membuat pihak nagari menjadi sulit untuk mengisi atas kekosongan bidan desa di poskesri nagari kudo-kudo inderapura.

Konflik yang ketiga yaitu krisis atau puncak konflik yaitu dimana semua masalah muncul dan memuncak jika, jika dilakukan komunikasi

akan cenderung menuduh satu sama lain. Dari pihak pemilik tanah yang sudah dihibahkan ke nagari mereka tidak mengizinkan bidan desa lain untuk mengisi poskesri tersebut, karena mereka mengatakan bahwa poskesri didirikan di tanah keluarganyadan dimana honor bidan desa juga tidak lagi turun dari pihak kabupaten dikarenakan poskesri ini sudah lama tidak berproses, oleh karena itu pihak nagari menjadi kebingungan dalam masalah ini.

Konflik yang keempat yaitu pascakonflik dimana pada tahap ini dilakukan penyelesaian dari permasalahan yang ada agar menjadi lebih normal, namun dalam tahapan penyelesaian konflik ini tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Pihak nagari dan lembaga nagari sudah ikut andil dalam masalah ini dan juga memberi solusi, karena nagari ingin yang terbaik untuk masyarakatnya. Namun tidak dipungkiri masalah ini belum ditemukan penyelesaian dari konflik tersebut, sehingga membuat poskesri ini kosong sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods:Kuantitatif Kualitatif-Mix Methods Positivsm-Phenomenology Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, dan Laporan (Cetakan 1)*. Jakarta: Kencana.
- Fisher, S. (2010). *Pengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak(Edisi Bahasa Indonesia)*. Indonesia, Jakarta: The British Council.
- Gobel, V. L. (2016). Pemanfaatan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 3(1), 24.
- Ife, J., & Frank, T. (2016). *Community Development Alternatif Pengembangan*

- Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Selemba Humanika.
- Winardi. (2007). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- J, D. N., & Bagong, S. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurniasanti, e. (2021). identifikasi kendala dengan kolaborasi Theory of constraints dan supply chain management. *jurnal pajak dan negara*, 224-233.
- Lestari, E. R. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa. *Ejournal Administrasi Negara*, 469.
- Nitisemito, A. S. (1982). *Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prima, A. (2014). Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar). *Jom Fisip*, 1(2), 13.
- Putri, D. (2015). Peran Pemerintah Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jom Fisip*, 2(1), 12.
- Silaban, E. B. (2012). Pengaruh Konflik Terhadap Kinerja Karyawan-Karyawan.
- Thoha, M. (2005). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Veithzal, R. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wardoyo, H. (2018). Peran Lembaga Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. *Skripsi Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.